

The Role of the Cooperatives and Micro Enterprises Service in the Sidoarjo Regency MSME Clinic Program

[Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Program Klinik UMKM Kabupaten Sidoarjo]

Muhammad Saiful Alvian¹⁾, Isnaini Rodiyah^{*2)}

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. This research study aims to analyze and describe the Clinic of the Cooperative and Micro Enterprises Office in improving the empowerment of micro-enterprises in Sidoarjo Regency. The development of the micro-enterprise sector of the local government through the Cooperative and Micro Enterprises Office presents the Micro-Enterprise Clinic as a solution to improve the competitiveness and skills of business actors with role theory. According to Jim Ife & Frank Tesoriero (2008), the research method uses a qualitative descriptive approach, by conducting interviews, documentation and observation. The results of the research obtained indicate that: The Role of MSME Facilitators has made efforts to assist individuals or institutions have been given companions or mentors for MSME actors in various business aspects. The Educating Role is running well and has been given significantly Through training. The Role of Representation, members of the micro MSME training and technical guidance provided have had a very significant impact. The communication forum is running well so that it is able to direct the fostered micro-enterprises to obtain information regarding access to capital assistance, and finally the Technical Role, has been running well by being directed regarding how to get good product photos so that they can be used to support the legality of a business, especially related to the micro-enterprise products used. Furthermore, financial management training is provided, and technical guidance is provided to assisted micro-entrepreneurs experiencing difficulties managing their finances. In addition to the technical guidance, the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) is also a program of the Sidoarjo Regency Cooperatives and Micro Enterprises Office to improve the quality and competency of business human resources.

Keywords - Role; MSME Clinic; Micro Enterprises

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Program Klinik UMKM Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang di dapatkan menunjukkan bahwa: Pertama Peran Fasilitator UMKM telah melakukan upaya pendampingan individu atau lembaga telah diberikan pendamping atau pembimbing bagi pelaku UMKM dalam berbagai aspek bisnis. Kedua Peran Mendidik berjalan dengan baik dan telah diberikan secara signifikan Melalui pelatihan. Ketiga Peran Representasi, anggota UMKM mikro pelatihan dan bimtek yang diberikan sangat memberikan dampak yang sangat signifikan. Forum komunikasi berjalan dengan baik sehingga mampu mengarahkan para pelaku usaha mikro binaan untuk mendapatkan informasi seputar akses bantuan pemodal. Keempat Peran Teknis, sudah berjalan dengan baik dengan diarahkan terkait bagaimana mendapatkan foto produk yang baik agar dapat digunakan sebagai penunjang legalitas suatu usaha khususnya terkait produk usaha mikro yang digunakan. Tak hanya itu saja pemahaman terkait pengelolaan keuangan juga diberikan, bimbingan teknis pengelolaan keuangan ditunjuk kepada pelaku usaha mikro binaan yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan dalam menjalankan usahanya. Selain Bimtek, Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) juga merupakan salah satu program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas serta kompetensi SDM pelaku usaha.

Kata Kunci - Peran; Klinik UMKM; Usaha Mikro

I. PENDAHULUAN

Perkembangan koperasi di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat. Koperasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, tetapi juga memajukan sektor ekonomi dan sosial di berbagai daerah. Koperasi telah memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan di Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui penyediaan layanan keuangan, pelatihan, pendidikan, dan akses pasar bagi para anggotanya. Koperasi juga telah diakui sebagai mitra penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan demokrasi,

meningkatkan pendapatan, mendorong inklusi sosial, peduli terhadap lingkungan, dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian dunia. Terlepas dari tantangan yang dihadapi koperasi, seperti kompleksitas peraturan dan penurunan kinerja, koperasi memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dengan memperbaiki dan meningkatkan efektivitasnya, koperasi dapat memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan dan ekonomi yang berkelanjutan, memberdayakan individu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesimpulannya, perkembangan koperasi di Indonesia telah memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan serta kontribusi yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, koperasi perlu terus dikembangkan dan didukung agar dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional. [1]

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, salah satunya yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah bidang ekonomi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bagian dari dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan potensi dan peranan yang sangat penting dan strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Perhatian pada pengembangan sektor UMKM memberikan makna tersendiri pada usaha menekan angka kemiskinan suatu negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara negara yang memiliki income perkapita yang rendah [2]

Pada pasal 38 UU No. 20 tahun 2008 juga ditegaskan, bahwa kordinasi pengendalian, dan pemberdayaan UMKM ada pada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang UMKM. Menteri yang dimaksud dalam UU tersebut adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pada pasal 38 ayat (2) disebutkan pula, bahwa kordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan UMKM [3]. Adapun upaya yang telah dilakukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo terhadap usaha- usaha yang telah dilakukan dalam memenuhi standarisasi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dalam upaya tersebut Dinas koperasi juga melakukan tinjauan terhadap UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dengan memberikan modal, melatih mengembangkan usahanya. keterampilan, memberikan fasilitas, promosi hingga mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan produksi. Upaya tersebut gencar dilakukan pemerintah untuk mengedepankan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam mengupayakan permasalahan yang ada, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Salah satu bentuk pemberdayaan yang ada di Indonesia yang sedang berkembang saat ini yaitu Usaha Mikro, Kecil dan, Menengah (UMKM). Pemberdayaan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis melalui penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi 3 usaha yang mandiri. Selanjutnya tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 5 yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan meningkatkan peran Usaha Mikro kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Adanya pemberdayaan UMKM diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. [4]

Peran UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, yaitu memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60% atau sekitar Rp8.573 Triliun setiap tahunnya. Selain itu, UMKM juga 97% total tenaga kerja Indonesia atau 116 juta orang. Dikarenakan peran UMKM sangat krusial bagi perekonomian Indonesia, mengetahui berapa besar jumlah dan tingkat pertumbuhannya sangatlah penting. Menurut survei tahunan usaha kecil CPA Australia, 2024 menjadi tahun yang sukses untuk usaha kecil di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan hingga 83 persen, naik dari 80 persen pada 2023. Hal ini merupakan hasil pertumbuhan tertinggi sejak 2020. Momentum positif ini diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun 2025, dengan 87 persen usaha kecil diprediksi tumbuh, menempatkan Indonesia di antara tiga pasar dengan pertumbuhan tertinggi dari 11 pasar yang disurvei (Australia, Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam). Keyakinan terhadap perekonomian Indonesia tetap kuat, dengan 76 persen usaha kecil memperkirakan ekonomi akan tumbuh, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata survei Asia-Pasifik yang hanya mencapai 67 persen [5]

Perkembangan sektor usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menghadirkan Klinik Usaha Mikro sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing dan keterampilan para pelaku usaha. Klinik ini berfungsi sebagai pusat pelatihan, konsultasi, serta pembinaan bagi mereka yang ingin

mengembangkan bisnisnya dan menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif. Dengan berbagai program yang ditawarkan, Klinik Usaha Mikro menyediakan pendampingan di berbagai bidang, mulai dari pengelolaan keuangan, strategi pemasaran berbasis digital, hingga penggunaan teknologi dalam bisnis. Pelaku usaha mikro yang tergabung dalam program ini mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka, baik dalam aspek manajerial maupun operasional. Menurut data terbaru, lebih dari 176.000 pelaku usaha telah menjadi bagian dari program pembinaan Klinik Usaha Mikro. Strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasis ekonomi kreatif, menjadi focus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam mendongkrak pembangunan ekonomi. Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaunching kerjasama dan kemitraan, antara pelaku UMKM dan pengusaha. Menurut Subandi dalam dunia usaha saat ini, muncul ide terkait pentingnya dalam bermitra. Mulai dari kemitraan antar pelaku usaha dengan influencer maupun publik figure, hingga kemitraan antar perusahaan besar Indonesia maupun dunia [6]

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkab Sidoarjo, M Edi Kurniadi mencatat jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 176.000 pelaku. Dari jumlah ini, tentunya jika dibina dengan baik maka potensi pertumbuhan UMKM dan ekonomi di Sidoarjo akan naik signifikan. Saat ini Sidoarjo sebagai Kabupaten UMKM dengan peningkatan bimbingan yang baik kepada pelaku usaha mikro bimtek barang/jasa ini juga merupakan tindaklanjut dari pemerintah pusat. Tujuannya, agar pelaku usaha mendaftarkan produknya ke dalam e-katalog. Pada bimtek ini, sebanyak 50 peserta ikut temu kemitraan. Sedangkan 100 peserta lainnya ikut Bimtek. Bimtek ini meliputi pengenalan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, tata cara pendaftaran dan verifikasi penyedia serta strategi memenangkan tender pemerintah hingga peningkatan promosi produk UMKM [7]

Tahun 2024 menjadi tahun yang signifikan bagi perkembangan UMKM di Sidoarjo. Dengan dukungan dari pemerintah daerah dan pusat, serta adopsi teknologi digital yang semakin luas, UMKM di Sidoarjo mengalami pertumbuhan yang pesat. Banyak pelaku UMKM yang berhasil memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk memasarkan produk mereka, sehingga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo aktif mendukung UMKM melalui berbagai program, termasuk pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan manajerial, memperkenalkan teknologi baru, serta memperluas jaringan pasar. Pemerintah juga menyelenggarakan pameran dan bazaar untuk mempromosikan produk UMKM lokal dan mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen potensial. Kolaborasi antara UMKM, pemerintah, dan sektor swasta semakin meningkat. Kemitraan ini membantu UMKM mengakses sumber daya dan pasar yang lebih luas.

Usaha Mikro Dalam Program Klinik UMKM mempunyai beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran diantaranya sebagai berikut: Keterbatasan SDM dan sarana prasarana sehingga antara usaha mikro yang dengan fasilitas peningkatan usaha mikro tidak seimbang. b) Beberapa kegiatan harus ditunda dikarenakan refocusing anggaran. Sejak Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu: a) Menyediakan pendampingan usaha mikro melalui klinik usaha mikro seperti untuk fasilitasi perijinan usaha, konsultasi produk dan lainnya. b) Melaksanakan kegiatan non anggaran seperti sedekah ilmu c) Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan usaha mikro seperti pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan pendampingan usaha. d) Melaksanakan kegiatan untuk perluasan akses pasar seperti pameran dan fasilitasi kemitraan. e) Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), dan lembaga lainnya. Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut tentunya harus ada solusi dengan peran pemerintah sehingga dapat mengatasi semua hambatan yang ada sehingga serta mampu terealisasi kinerja secara optimal.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. langkah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam urusan Koperasi dan Usaha Kecil tersebut sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi yang memiliki tujuan utama yaitu meningkatnya kualitas kelembagaan dan produktivitas koperasi dan usaha mikro melalui pengembangan potensi lokal untuk mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, yang memiliki dua sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Meningkatnya Usaha Mikro Mandiri yang masing-masing memiliki indikator dan target yang harus dicapai pada tahun 2023 - 2024 ini UMKM tersebar diberbagai penjuru daerah dan salah satunya yaitu Kabupaten Sidoarjo daerah pemilik UMKM terbanyak . Ribuan UMKM di bidang kuliner dan kerajinan tersebar di 18 kecamatan. Berikut data:

Tabel 1. Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah	
Rincian	Jumlah
Usaha Mikro	54.891 Unit Usaha
Usaha Kecil Menengah	154 Unit Usaha
Usaha Besar	16.000 Unit Usaha.

Dari tabel 1 usaha mikro kecil menengah termasuk dalam kreteria tinggi, dengan berbagai usaha yang telah dijalankan oleh pelaku UMKM di Sidoarjo terdapat kurang lebih 82 sentra industri rakyat serta kampung usaha, kampung sandal dan sepatu, seperti kampung jajanan, kampung sayangan, kampung kerupuk, kampung batik, dan lain-lain. Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sudah terkenal sebagai kabupaten usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga pondasi ekonominya cukup kuat saat terjadi hyper inflasi dan resesi yang melanda beberapa waktu yang lalu. Pada tahun 2022 Surabaya Eksport Center berhasil mendukung 1.500 UMKM *go to eksport* dari 8 provinsi di bawah Kementerian Perdagangan. Dari jumlah sebanyak itu, 300 UMKM di antaranya adalah berasal dari Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Pertama, Penelitian tersebut dilakukan oleh Wahyu Tri Wijaya Tahun 2018, dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surakarta Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Handycraft Surakarta” [8]. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta melaksanakan peran sebagai fasilitator dengan memberikan akses permodalan melalui jalinan kemitraan dengan lembaga perbankan maupun nonbank (BUMN) serta memberikan fasilitas tempat usaha, Peran regulator memberikan pelayanan perijinan, kebebasan retribusi dan biaya sewa tempat usaha yang sudah disediakan. Dan peran sebagai katalisator dengan mengikutsertakan sosialisasi antar usaha [9]. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, Penelitian sebelumnya fokus pada pemberdayaan UMKM Handycraft Surakarta, Sementara penelitian saat ini fokus pada Peran Klinik Dinas Koprasi dan Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. [10]

Kedua, Penelitian tersebut dilakukan oleh Aziza Nur Auliya, Lukman Arif Tahun 2021, Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam penanganan Dampak Pandemi Covid-19 pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik”. Dengan Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif. Hasil Penelitiannya Menunjukkan bahwa Peran dari Dinas Koperindag telah menjalankan perannya dengan baik dalam menangani dampak tersebut dampak pandemi Covid-19 terhadap Usaha Mikro di Kabupaten Gresik. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini sama- sama meneliti Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, Penelitian sebelumnya fokus pada Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik, Sedangkan Penelitian saat ini fokus pada Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo [11]

Ketiga, Penelitian tersebut dilakukan oleh Nanang Suparman, Dina Fitria, Syamsir, Engkus Tahun 2019, Dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Pembinaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat Dalam Memajukan Perkoperasian di Daerah”. dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan aspek diklat, permodalan, manajemen dan action research yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat belum optimal. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, Penelitian sebelumnya fokus dalam memajukan perkoperasian di daerah, Sedangkan Penelitian saat ini merujuk pada Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo [12]

Program Klinik Bisnis Usaha Mikro melayani berbagai layanan yaitu konsultasi, pendampingan, dan fasilitasi. Pertama, konsultasi diantaranya konsultasi analisa usaha dan evaluasi. Kedua, pendampingan meliputi pendampingan pemasaran, legalitas usaha, manajerial usaha, akses permodalan, dan administrasi usaha. Ketiga, fasilitasi diantaranya mengenai fasilitasi pengurusan dan legalitas usaha. Program kegiatan Klinik Bisnis Usaha Mikro akan terbagi menjadi 2 program. Pertama, program tematik yang akan mengangkat suatu tema yang disediakan oleh masing-masing konsultan pada setiap minggunya. Tema yang diberikan seperti mencatat keuangan usaha dengan aplikasi, desain produk, pemasaran melalui social media, dan lain-lain. Kedua, Program klinik umum, dimana konsultan akan menerima berbagai permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya program klinik bisnis usaha mikro diharapkan mampu memberdayakan dan menjawab segala kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Upaya yang dilakukan melalui beberapa layanan yaitu konsultasi, pendampingan dan fasilitasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penulis untuk mengetahui lebih lanjut terkait peran klinik Dinas Koprasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori peran Menurut Jim Ife & Frank Tesoriero (2008), yang terdapat dalam bukunya yang telah diterjemahkan dengan judul Community Development dengan empat indikator peranan diantaranya: Pertama, peran memfasilitasi (facilitative roles) Peran memfasilitasi yaitu peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Peran fasilitasi untuk mendorong terciptanya kondisi mufakat dalam pengambilan keputusan sebuah program dan kegiatan yang sesuai kebutuhan kelompok. Peran fasilitasi dilakukan untuk mendorong kelompok-kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan usaha secara efisien. Kedua, peran mendidik (educational roles) Peran mendidik yaitu peran yang berkaitan dengan pengembangan proses belajar bersama penerima manfaatnya, dalam upaya peningkatan wawasan terhadap fokus kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat penerima manfaatnya. Peranan mendidik dilakukan dengan peningkatan kesadaran, memberikan informasi, melakukan pelatihan bagi individu atau kelompok dan masyarakat. Pekerja sosial memiliki peranan dalam penentuan agenda sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan pada proses peningkatan produktifitas tapi juga berperan aktif memberikan masukan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Ketiga, peran representasi (representational roles) Peran representasi yaitu peran dalam membantu peningkatan pemahaman terhadap konsep tertentu. Diketahui dengan meningkatnya kemampuan dan dapat memecahkan masalah pada masalah tertentu. Pada peranan representasi social worker bekerja sebagai agen untuk perubahan dengan membantu masyarakat untuk menyadari kondisi, mengembangkan relasi untuk dapat bekerja sama dengan pihak lain dan membantu masyarakat membuat suatu perencanaan. Keempat peran teknis (technical roles) Peran teknis, yaitu peran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja seseorang. Menurut Jim Ife (1995) tugas teknis: mengelola langkah-langkah atau tahap-tahap program mulai dari penjajakan kebutuhan sampai ke monitoring-evaluasi [13].

II. METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah dan memberikan informasi induktif yang sesuai dengan fakta yang ada pada subjek tersebut. Untuk memahami dan mempelajari fenomena yang diamati, peneliti harus mencari informasi secara langsung. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui tahap wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data primer sedangkan terkait data sekunder berasal dari jurnal dan berita media massa [14].

Lokasi penelitian dilakukan di klinik Dinas Koprasi Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian adalah peran Dinas Koprasi dan Usaha Mikro Dalam Program Klinik UMKM Kabupaten Sidoarjo. Untuk menentukan informan peneliti menggunakan Teknik purposive sampling yang melibatkan Kepala Koprasi UMKM serta para pelaku UMKM. Dalam penelitian ini sebagai informan adalah 1) Kabid pemberdayaan UMKM, 2) Staf usaha Mikro, 3) Staf klinik usaha Mikro. Selanjutnya teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan konsep Miles Huberman [15] dipergunakan untuk menganalisis data melalui 4 tahapan (1) Pengumpulan Data, adalah proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti berdasarkan cakupan penelitian. (2) Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, pengabstraksi, dan transformasi data hasil penelitian dari lapangan. (3) Penyajian Data adalah pengumpulan data yang disusun secara terstruktur untuk memungkinkan penarikan kesimpulan. (4) Penarikan Kesimpulan adalah kegiatan untuk menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan pada pendahuluan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Klinik Dinas Koprasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro Kabupaten Sidoarjo

Koperasi telah memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan di Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui penyediaan layanan keuangan, pelatihan, pendidikan, dan akses pasar bagi para anggotanya. Koperasi juga telah diakui sebagai mitra penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan demokrasi, meningkatkan pendapatan, mendorong inklusi sosial, peduli terhadap lingkungan, dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian dunia. Keberadaan Klinik Usaha Mikro merupakan langkah yang positif dalam upaya pemberdayaan usaha mikro di Sidoarjo. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap dampak program ini terhadap para pesertanya. Evaluasi ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan omzet peserta setelah mengikuti pelatihan, tingkat keberlanjutan usaha mereka, serta sejauh mana mereka mampu menerapkan ilmu yang telah diberikan. Untuk peran sebagai inovator, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki inovasi pelayanan yaitu

adanya klinik usaha. Klinik usaha digunakan sebagai wadah bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi dan pendampingan para pelaku usaha yang ingin mendapatkan pendampingan untuk masuk ke pemasaran online. Beberapa pelaku usaha juga seringkali menggunakan pelayanan klinik usaha yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan hal tersebut dirasa memberikan manfaat bagi para pelaku usaha, karena bisa melakukan konsultasi dan mendapatkan pendampingan serta pelatihan yang berguna bagi ketahanan usaha mereka. Kesimpulan data yang di proses menggunakan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008) yang menjelaskan 4 Indikator peran pemerintah seperti: Peran Memfasilitasi, Peran Mendidik, Peranan Representasi, Peranan Teknis dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Peran Fasilitas

Peran fasilitas UMKM adalah individu atau lembaga yang berfungsi sebagai pendamping atau pembimbing bagi pelaku UMKM dalam berbagai aspek bisnis. Tugas utama mereka adalah memberikan dukungan, pengetahuan, serta keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan bisnis dan mendorong pengembangan usaha. Memfasilitasi dapat dapat berupa berbagai kebutuhan kalangan, seperti konsultan bisnis, lembaga pemerintah, swasta, ataupun organisasi non-profit yang fokus pada pengembangan UMKM. Dalam peranan memfasilitasi harus ada seseorang yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertemuan, diskusi, atau proses pembelajaran. Mereka adalah pilar utama dalam menciptakan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan, serta memastikan kelancaran berbagai proses di lingkungan profesional.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2011 pasal 14 bahwa peran dinas koperasi dan usaha mikro adalah memberikan Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Hal ini sesuai dengan Perencanaan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021 sampai 2026 yang menyebutkan salah satu fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah memberikan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam hal peran fasilitas dapat dibuktikan dengan dibentuknya Klinik Usaha Mikro sebagai wadah bagi para pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu fungsi klinik Usaha Mikro adalah memberikan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku Usaha Mikro yang menjadi binaan klinik dinas Usaha Mikro. Sejauh ini sebanyak 176.425 Ribu telah menjadi anggota binaan Klinik Dinas Koperasi di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah tersebut merupakan pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari dinas koperasi dan Usaha Mikro. Tujuan pemberian pelatihan dan pembinaan bagi para pelaku usaha mikro dengan cara mengoptimalkan setiap sumber daya manusia (SDM) agar berdaya saing yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pelatihan dan pembinaan. Berikut dokumentasi Gedung Klinik Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo:



Gambar 1. Klinik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (2025)

Dengan hadirnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Sebagian besar peserta yang telah mengikuti program Klinik Usaha Mikro mengaku mendapatkan manfaat signifikan. Mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya legalitas usaha, pencatatan keuangan yang baik, serta strategi pemasaran yang lebih efektif. Bagi pelaku usaha pemula, bimbingan yang diberikan dalam program ini menjadi modal penting untuk mengelola bisnis secara lebih profesional. Selain itu, akses terhadap modal usaha juga menjadi salah satu aspek yang didukung oleh program ini. Sejalan dengan hasil penelitian Muhamad Bohori Tahun 2019, Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Koperasi Dalam Pengembangan UMKM Unggulan Di Surabaya”. Dengan Menggunakan Metode

Penelitian Kualitatif. Hasil Penelitiannya Menunjukkan bahwa Peran Dinas Koperasi sangat penting bagi pengembangan dan pembangunan dalam Bidang ekonomi, karena peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah pertama yang akan diambil guna dilaksanakan pembangunan dalam bidang ekonomi.

B. Peran Mendidik

Pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang sangat penting bagi para pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha UMKM sangatlah penting karena dapat membantu mereka untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha mereka. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, para pengusaha UMKM dapat mengelola usahanya dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga dapat membantu para pengusaha UMKM untuk memahami pasar dan tren yang sedang berkembang. Hal ini penting agar mereka dapat mengikuti perkembangan pasar dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola usaha mereka. pendidikan dan pelatihan juga dapat membantu para pengusaha UMKM untuk membangun jaringan dan kerjasama yang baik dengan pihak lain. Dengan memiliki jaringan yang luas, para pengusaha UMKM dapat memperluas pasar dan menciptakan peluang bisnis baru yang menguntungkan.

Dalam hal ini, Dinas koperasi dan usaha mikro memiliki peran memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mikro. Dalam hal ini terdapat 2 peran spesifik yang dapat dilakukan Dinas koperasi dan usaha mikro dalam pemberdayaan usaha mikro menurut Jim Ifle dan Frank Tesoriero pada peran edukasional pemerintah harus memberikan Informasi terkait potensi yang berpeluang dan Pelatihan. Mengenai bagaimana seorang pemberdaya memberikan informasi yang relevan yang dapat membantu pelaku usaha mikro merencanakan cara yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 tahun 2018 Tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro pada pasal 10 ayat (1) huruf b, dan c yaitu melakukan penyuluhan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Berdasarkan penelitian di lapangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Sidoarjo melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro dengan cara memberikan modul sebagai panduan bagi para pelaku usaha mikro, ada 12 modul yang tersedia yang nantinya modul panduan tersebut di gunakan untuk pelatihan dan pembinaan. Berikut beberapa modul terkait :



Gambar 2. Modul Pelatihan PTK dan buku pembelajaran untuk UMKM

Sumber : Departemen Pengembangan UMKM (DPUM)

Pentingnya pelatihan untuk UMKM tidak hanya mencakup peningkatan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat fondasi usaha agar mampu bertahan dalam segala situasi. Pelatihan bagi UMKM bukan sekadar agenda formalitas. Ini adalah upaya nyata untuk memberikan bekal yang relevan kepada para pelaku usaha dalam menghadapi perubahan zaman. Kemajuan teknologi, dinamika pasar global, hingga perubahan preferensi konsumen memaksa para pelaku UMKM untuk terus beradaptasi. Dengan mengikuti pelatihan, mereka dapat mengembangkan keterampilan baru, memahami tren pasar, dan menciptakan strategi yang lebih efektif. Artikel ini akan menguraikan secara mendalam bagaimana pelatihan berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM di berbagai aspek. Pelatihan menjadi sarana untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan UMKM. Melalui pelatihan, para pelaku usaha belajar tentang manajemen keuangan, pemasaran digital, hingga optimalisasi rantai pasok. Hal ini membantu mereka menjalankan usaha dengan cara yang lebih terstruktur, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Berikut hasil wawancara para pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan:

“Dari beberapa kali mengikuti pelatihan UMKM kami merasa terbimbing dan ada harapan kedepan bagaimana cara mengembangkan keterampilan baru sesuai dengan tren pasar yang ada. Semoga kedepannya pelatihan dan buku panduan modul ini terus diberikan agar kami mampu memajukan perekonomian terutama untuk keluarga”

Dari hasil wawancara tersebut bahwa bentuk pendidikan dan pelatihan yang diberikan dapat membantu para pengusaha UMKM untuk memahami pasar dan tren yang sedang berkembang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nanang Suparman, Dina Fitria, Syamsir, Engkus Tahun 2019, Dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Pembinaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat Dalam Memajukan Perkoperasian di Daerah”, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan aspek diklat, permodalan, manajemen dan *action research* juga telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.

C. Peran Representasi

Peran representasi yaitu peran dalam membantu peningkatan pemahaman terhadap konsep tertentu. Diketahui dengan meningkatnya kemampuan dan dapat memecahkan masalah pada masalah tertentu. Pada peranan representasi pekerja sosial bekerja sebagai agen untuk perubahan dengan membantu masyarakat untuk menyadari kondisi, mengembangkan relasi untuk dapat bekerja sama dengan pihak lain dan membantu masyarakat membuat suatu perencanaan. Tugas penghubung: membangun relasi dengan berbagai sumber, pihak dan lembaga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dampingannya Jim Ife (1995). Peran perwakilan menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero merupakan peran yang digunakan untuk menunjukkan berbagai peran pemerintahan dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan atau agar bermanfaat. Dalam hal ini peran perwakilan dapat dilihat dari bagaimana pelaku usaha mikro memperoleh kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi, membuka jaringan kerja dengan pihak lain, dan mendapatkan modal usaha.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 tahun 2018 tentang peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pemberdayaan usaha mikro pada pasal 10 ayat (1) huruf j dan n yaitu memfasilitas jaringan usaha dan kerja sama kemitraan. Berdasarkan penelitian di lapangan, upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yakni mengimplementasikan visi dan misi bupati yang kemudian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Adapun program yang dilakukan dengan cara memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro. Sebagai pendukung sumber daya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mensinergikan berbagai unit pelaksana teknis (UPT) dan Kelompok masyarakat untuk memaksimalkan kinerja di dalam organisasi, Serta menjalankan kegiatan yang ada di dalam organisasi dalam rangka mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan legalitas Produk, legalitas usaha Legalitas Usaha, dan sumber daya manusia dari sektor Usaha Mikro yang ada di kabupaten Sidoarjo. Untuk bantuan permodalan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga mensinergikan dengan pihak Perbankan dan koperasi terkait untuk memperdayakan pelaku usaha dalam memberikan pinjaman kepada pelaku Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Program pendampingan akses pembiayaan salah satunya program yang dapat membantu mengarahkan para pelaku usaha mikro binaan untuk mendapatkan informasi seputar akses bantuan Pemodal dan adupun kegiatan Sedekah ilmu yang menjadi strategi baru bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam membantu para pelaku Usaha Mikro yang didapat secara gratis. Melalui kegiatan ini, antar pelaku usaha mikro serta pihak pemerintah dapat bersinergi satu sama lain dengan hadirnya forum komunikasi yang lebih menarik dan efisien. Adapun 4 program yang diberikan pemerintah daerah yang melekat pada dinas koperasi dan Usaha Mikro yaitu, Bantuan Pemodal Untuk Kelompok Usaha Perempuan, Bedah Warung, UMKM Naik Level, dan Fasilitas Pembiayaan Serta Perijinan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha mikro yang telah menjadi binaan di Klinik Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo:

“Disini kami selama menjadi binaan klinik pelaku Usaha Mikro koprasi kabupaten sidoarjo telah diberikan forum komunikasi, selain pelatihan dan bimtek pelaku usaha juga dibuatkan grup khusus sesama pengusaha UMKM dengan kategori jenis usaha yang sama sehingga dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Mereka juga mengaku telah difasilitasi beberapa pilihan berupa link (bank) untuk pengajuan pemodal dengan bunga yang rendah”

Dari hasil wawancara anggota UMKM mikro pelatihan dan bimtek yang diberikan sangat memberikan dampak yang sangat signifikan. Forum komunikasi sangat difasilitasi dengan baik sehingga mampu mengarahkan para pelaku usaha mikro binaan untuk mendapatkan informasi seputar akses bantuan Pemodal dan adupun kegiatan Sedekah ilmu yang menjadi strategi baru bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyu Tri Wijaya Tahun 2018, dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Surakarta Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Handycraft Surakarta”. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta melaksanakan peran sebagai fasilitator dengan memberikan akses permodalan melalui jalinan kemitraan dengan lembaga perbankan maupun nonbank (BUMN)

serta memberikan fasilitas tempat usaha, Peran regulator memberikan pelayanan perijinan, kebebasan retribusi dan biaya sewa tempat usaha yang sudah disediakan. Dan peran sebagai katalisator dengan mengikutsertakan sosialisasi antar usaha.

d) Peran Teknis

Peran teknis, yaitu peran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja seseorang. Menurut Jim Ife (1995) tugas teknis disini adalah mengumpulkan dan menganalisa data, bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa data serta mempresentasikan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan, membuat selebaran, spanduk dan surat dengan menggunakan dan mengalihkan kemampuan penguasaan teknologi komputer kepada masyarakat, Melakukan presentasi (tertulis atau lisan) yaitu menyampaikan gagasan kepada masyarakat pendampingan dan pihak-pihak lain sehingga mampu mengekspresikan pikiran, tindakan secara langsung dan tulisan, Pengelolaan program yaitu membangun struktur, nilai, prosedur dan mekanisme program yang sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat. Dan yang terakhir pengelolaan keuangan yaitu manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat.

Peran pemberdaya harus mempunyai keterampilan atau keahlian dalam hal pengembangan, meliputi keterampilan dalam menggunakan komputer, manajemen, dan kemampuan untuk mengontrol keuangan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 tahun 2018 tentang peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pemberdayaan usaha mikro pada pasal 10 ayat (1) huruf e yaitu melakukan bimbingan teknis dalam pengelolaan usaha (pemerintah indonesia, 2018) Berdasarkan penelitian di lapangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Sidoarjo, Para pelaku usaha mikro binaan klinik usaha mikro akan diberikan ilmu pengetahuan mengenai teknis dalam foto produk.

Para pelaku usaha mikro akan diarahkan terkait bagaimana mendapatkan foto produk yang baik agar dapat digunakan sebagai penunjang legalitas suatu usaha khususnya terkait produk usaha melalui properti apa saja yang digunakan. Tak hanya itu saja pemahaman terkait pengelolaan keuangan juga diberikan, bimbingan teknis pengelolaan keuangan ditunjuk kepada pelaku usaha mikro binaan yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan dalam menjalankan usahanya. Selain Bimtek, Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) juga merupakan salah satu program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas serta kompetensi SDM pelaku usaha. Kegiatan penjamaah makanan merupakan salah satu bentuk kegiatan SKKNI yang ditunjuk kepada pelaku usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman khususnya binaan di klinik. Penjamaah makanan ini berhubungan langsung dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian. Hal ini sesuai dengan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003) berikut hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha mikro yang telah menjadi binaan di klinik mengenai peran teknis yang telah didapatkan selama menjadi binaan Klinik Usaha Mikro sebagai berikut:

“Kami selama menjadi binaan klinik sering diberikan motivasi untuk ikut pelatihan dan juga workshop terkait materi yang kami butuhkan dan materi tersebut telah disediakan, sehingga kami merasa terfasilitasi dan terus mengembangkan usaha kami dengan pendampingan dan juga pelatihan sesuai kebutuhan kami mampu memberikan motivasi bagi kami sebagai usaha mikro”

Dari hasil wawancara bersama pelaku UMKM tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha mikro selalu didorong untuk mengikuti pelatihan teknis untuk menunjang pengetahuan, Dengan pelatihan yang tepat, para pelaku usaha bisa menguasai keterampilan baru, memperluas pasar, dan menghadapi tantangan bisnis dengan lebih percaya diri. Sejalan dengan teori yang digunakan, Pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang sangat penting bagi para pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sebagai pengusaha UMKM harus terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif penting bagi pengusaha UMKM untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.

IV. KESIMPULAN

Perkembangan koperasi di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat. Koperasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, tetapi juga memajukan sektor ekonomi dan sosial di berbagai daerah. Koperasi telah memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan di Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui penyediaan layanan keuangan, pelatihan, pendidikan, dan akses pasar bagi para anggotanya. Koperasi juga telah diakui sebagai mitra penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan demokrasi, meningkatkan pendapatan, mendorong inklusi sosial, peduli terhadap lingkungan, dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian dunia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa: Peran Fasilitator UMKM sudah berjalan dengan baik, individu atau lembaga telah diberikan pendamping atau pembimbing bagi pelaku UMKM dalam berbagai aspek bisnis dengan memberikan dukungan, pengetahuan, serta keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan bisnis dan mendorong pengembangan usaha. Peran Mendidik berjalan dengan baik dan telah diberikan secara signifikan Melalui pelatihan, para pelaku usaha belajar tentang manajemen keuangan, pemasaran digital, hingga optimalisasi rantai pasok. Hal ini membantu mereka menjalankan usaha dengan cara yang lebih terstruktur, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya Peran Representasi, anggota UMKM mikro pelatihan dan bimtek yang diberikan sangat memberikan dampak yang sangat signifikan. Forum komunikasi berjalan dengan baik sehingga mampu mengarahkan para pelaku usaha mikro binaan untuk mendapatkan informasi seputar akses bantuan Pemodal dan kegiatan Sedekah ilmu yang menjadi strategi baru bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, dan yang terakhir Peran Teknis, sudah berjalan dengan baik dengan diarahkan terkait bagaimana mendapatkan foto produk yang baik agar dapat digunakan sebagai penunjang legalitas suatu usaha khususnya terkait produk usaha mikro yang digunakan. Tak hanya itu saja pemahaman terkait pengelolaan keuangan juga diberikan, bimbingan teknis pengelolaan keuangan ditunjuk kepada pelaku usaha mikro binaan yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan dalam menjalankan usahanya. Selain Bimtek, Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) juga merupakan salah satu program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas serta kompetensi SDM pelaku usaha. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo harus terus melakukan inovasi dan evaluasi terhadap program yang telah dijalankannya, selain itu diperlukan sosialisasi program yang lebih masif lagi agar pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo mengetahui program yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Begitupun untuk pelaku usaha mikro agar lebih aktif mencari informasi akan program-program dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga jurnal dengan judul “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Program Klinik UMKM Kabupaten Sidoarjo” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Bapak/ Ibu Informan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini.

REFERENSI

- [1] Aryanto, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 7, no. 1, pp. 30–42, 2020.
- [2] E. N. Arofah, E. Indartuti, and S. Hartono, "Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus UMKM Sandal dan Sepatu Wedoro)," 2022. [Online]. Available: <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/16831>.
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- [4] A. N. Auliya and L. Arif, "Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik," *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, vol. 22, no. 1, pp. 22–31, 2021. doi: <http://ojs.stiami.ac.id>.
- [5] Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2005.
- [6] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, 2017.
- [7] M. Bohori, "Peran Dinas Koperasi Dalam Pengembangan UMKM Unggulan Di Sidoarjo," 2019.
- [8] W. T. Wijaya, "Peran Dinas Koperasi dan UKM Surakarta Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM Surakarta) Handycraft Surakarta," 2018.
- [9] D. P. Ningrum, M. K. Widiyanto, and T. Yuliyanti, "Peran Dinas Koperasi Dan Umkm Dalam Pemberdayaan Umkm Di Kota Surabaya," 2018.
- [10] N. Suparman, D. F. Sulistia, Syamsir, and Engkus, "Peranan Pembinaan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Jawa Barat Dalam Memajukan Perkoperasian Di Daerah," *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, vol. 7, no. 2, p. 12, 2019. doi: 10.31289/publika.v7i2.2969.
- [11] N. Lestari, P. A. Pasha, M. Oktapianti, N. Oktariani, and H. H. Noviarita, "Teori Pembangunan Ekonomi," 2021.
- [12] A. Setiabudi, "Peran Dinas Perindustrian Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industri Erry Art Di Dusun Sidoharjo Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan," 2019.
- [13] J. Ife and F. Tesoriero, *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- [14] C. F. Sitepu and Hasyim, "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia," Niagawan, vol. 7, no. 2, 2018.
[15] Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2005.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.